



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 01

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah sektor pajak daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah, perlu diberikan biaya pemungutan pajak daerah kepada petugas pemungut pajak daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan dan Dinas/Instansi Yang Berkaitan Dengan Usaha-Usaha Pemasukan Pendapatan Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Petugas Pemungut Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara - Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 484);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D – 01).
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 08 Seri D-03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan;
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan dari Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan;
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
11. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka pemungutan;
12. Petugas Pemungut Pajak Daerah adalah petugas atau aparat satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang bertugas melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah;
13. Aparat Penunjang adalah aparat atau pejabat pada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang menunjang kegiatan pemungutan pajak daerah.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam usaha meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, kepada Petugas Pemungut Pajak Daerah dan Aparat Penunjang diberikan biaya pemungutan;
- (2) Besarnya biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan sektor Pajak Daerah;
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menata-usahakan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan membayarkan kepada Petugas Pemungut Pajak dan Aparat Penunjang;
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan secara berkala/periodik dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Biaya pemungutan Pajak Daerah dikenakan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, serta Pajak Daerah lainnya yang akan ditetapkan kemudian dengan peraturan daerah.

Pasal 4

Pengeluaran biaya pemungutan Pajak Daerah dibebankan kepada APBD Kota Tarakan

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Upah Pungut kepada Dinas Pendapatan dan Dinas/Instansi

Yang Berkaitan Dengan Usaha-usaha Pemasukan Pendapatan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembagian biaya pemungutan Pajak Daerah, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 13 Mei 2009

WALIKOTA TARAKAN

t.t.d

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 15 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum

H. Budiono

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KEPADA PETUGAS PEMUNGUT PAJAK

I. PENJELASAN UMUM

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusan-urusan pemerintah di daerahnya masing-masing.

Bahwa kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, diperlukan pembiayaan yang cukup. Daerah wajib menggali sumber pendapatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karenanya pemasukan PAD tersebut harus selalu ditingkatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, telah dinyatakan bahwa “ dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus)”.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka besarnya biaya pemungutan yang diberikan kepada petugas pemungut pajak dalam

peraturan daerah ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan sektor Pajak Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, juga memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tersebut merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Penggunaan biaya pemungutan bukan dimaksudkan untuk digunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan PAD dari sektor Pajak Daerah yang telah disetor ke Kas Daerah.
- Pasal 2 ayat (3) : Yang dimaksud menatausahakan dalam ketentuan ini adalah menetapkan prosentase jumlah biaya pemungutan Pajak Daerah dan membagikan kepada petugas pemungut Pajak Daerah dan aparat penunjang, serta melaporkannya kepada Kepala Daerah.
- Pasal 2 ayat (4) : yang dimaksud secara berkala / periodik adalah setiap triwulan.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas .

